

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan terkait faktor-faktor yang memengaruhi keparahan kemiskinan pada wilayah eks Karesidenan Kedu antara tahun 2010 hingga 2022, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendidikan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap keparahan kemiskinan di eks Karesidenan Kedu tahun 2010-2022.
2. Secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keparahan kemiskinan di eks Karesidenan Kedu tahun 2010-2022. Variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keparahan kemiskinan di eks Karesidenan Kedu tahun 2010-2022, sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap keparahan kemiskinan di eks Karesidenan Kedu tahun 2010-2022.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi praktis dan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terlibat untuk mengentaskan kemiskinan di

Kabupaten/Kota wilayah eks Karesidenan Kedu. Berikut beberapa rekomendasi yang mungkin diterapkan:

1. Pemerintah pusat dan daerah disarankan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menegaskan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua segmen masyarakat, terutama kelompok miskin karena rasio gini kabupaten/kota di wilayah eks Karesidenan Kedu pada tahun tertentu menunjukkan tingkat ketimpangan sedang, yaitu antara 0,30-0,49. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi pada sektor-sektor padat karya dan mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, seperti pertanian, UMKM, dan industri kreatif. Selain itu, pemerintah dapat menggiatkan program redistribusi pendapatan, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi kebutuhan pokok, dan akses layanan kesehatan serta pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. Kebijakan lokal yang berbasis data juga dapat diterapkan untuk mengidentifikasi kelompok dan wilayah yang paling rawan terhadap dampak pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
2. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang tegas untuk menangani peningkatan jumlah penduduk yang terus berkembang, yaitu dengan memaksimalkan program Keluarga Berencana (KB). Secara umum, tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di daerah terpencil atau desa cukup tinggi karena pemahaman mengenai pengendalian kelahiran masih terbatas. Oleh karena itu, program KB yang difokuskan di daerah

terpencil atau desa sangat penting. Sebagai contoh, program KB gratis di fasilitas kesehatan terdekat dapat membantu masyarakat yang mungkin enggan mengikuti KB karena biaya yang tinggi. Selain itu, penyuluhan dari dinas kesehatan juga dibutuhkan untuk menambah pemahaman masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya program KB, khususnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah dapat mengoptimalkan pembangunan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi angka keparahan kemiskinan meskipun jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan di Kabupaten/Kota wilayah eks Karesidenan Kedu.

3. Pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam Karesidenan Kedu diharapkan dapat menjamin akses pendidikan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah pelosok atau pedesaan. Keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah masih rendah, terutama di daerah yang sulit dijangkau karena terbatasnya infrastruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan rumah singgah atau tempat tinggal bagi siswa dari keluarga miskin agar jarak ke sekolah dapat lebih terjangkau. Selain itu, pendidikan non formal juga diperlukan untuk anak yang tidak melanjutkan sekolah serta ibu rumah tangga agar mereka dapat memperoleh keterampilan yang memungkinkan mereka untuk memulai usaha mandiri. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam eks Karesidenan Kedu

perlu terus memelihara dan mengoptimalkan kualitas pelayanan, serta sarana dan prasarana yang terkait dengan program-program yang bertujuan untuk memajukan kualitas masyarakat dalam bidang pendidikan. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus disalurkan dengan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan merata oleh masyarakat.

4. Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi dan meningkat di tahun 2020 efek dari pandemi COVID-19. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat memperkuat kemampuan dan keterampilan masyarakat, baik di bidang teknologi maupun bidang lainnya melalui fasilitasi dan penyelenggaraan program pelatihan. Pemerintah diharapkan dapat menggiatkan program perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendukung kelompok rawan dalam masyarakat. Ini dapat termasuk bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, atau menyediakan perlindungan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Selain itu, pemerintah berusaha memperluas kesempatan kerja dengan membangun usaha padat karya yang dapat menyerap pengangguran, serta menjalin kerjasama dengan investor untuk menciptakan peluang kerja di wilayahnya. Upaya lain yang dilakukan adalah mendorong minat kewirausahaan masyarakat agar mereka mampu menggagas peluang kerja baru untuk individu lain, yang kemudia mampu mengurangi tingkat pengangguran.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada pengkajian yang hanya mencakup wilayah eks Karesidenan Kedu, terdiri dari enam kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Selain itu, rentang waktu yang diteliti juga terbatas hanya 13 tahun dari tahun 2010 hingga 2022. Disarankan penelitian selanjutnya dapat menambah data dalam rentang waktu penelitian yang lebih lama dan memperluas objek yang diteliti agar hasil penelitian lebih komprehensif dan mampu menyempurnakan penelitian sebelumnya.

